

Perkara Hukum yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2024, Telkom menghadapi 223 perkara hukum, yang terdiri dari 98 perkara hukum pidana dan 125 perkara hukum perdata. Dari jumlah tersebut, 96 perkara merupakan kelanjutan dari kasus tahun sebelumnya, sementara 127 perkara merupakan kasus baru yang dimulai pada tahun 2024. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 125 perkara yang belum selesai dan prosesnya masih berlanjut hingga tahun mendatang.

Selain perkara-perkara di atas, pada bulan Oktober 2023, Telkom menerima permintaan dokumen dari U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) terkait keterlibatan Telkominfra dalam proyek dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (BAKTI Kominfo) terkait dengan penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. SEC kemudian memperluas penyelidikannya hingga mencakup penelaahan atas permasalahan akuntansi pengungkapan yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan praktik pelaporan keuangan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara keseluruhan, serta laporan publik mengenai proses hukum di Indonesia yang melibatkan Perusahaan, berbagai anak perusahaan dan afiliasi, serta beberapa klien dan *supplier* Telkom. Pada awal bulan Mei 2024, Telkom juga menerima tambahan permintaan

dokumen dari U.S. Department of Justice (DOJ) terkait permasalahan hukum yang menyangkut kepatuhan terhadap U.S. *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA).

Telkom bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat dan telah menunjuk penasihat hukum asing untuk melakukan investigasi internal terkait isu-isu tersebut. Telkom tidak dapat memprediksi durasi, hasil, atau dampak dari investigasi-investigasi tersebut, termasuk apakah akan berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Telkom. Lebih lanjut, pada Februari 2025, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan perintah presiden berjudul, “Menghentikan Penegakan Undang-Undang FCPA untuk Melindungi Ekonomi dan Keamanan Nasional Amerika Serikat,” yang menghentikan penegakan FCPA oleh DOJ selama 180 hari (dapat diperpanjang hingga 180 hari tambahan) hingga Jaksa Agung Amerika Serikat mengeluarkan pedoman penegakan FCPA yang telah diamandemen. Dikarenakan perubahan sifat dan ketidakpastian terkait regulasi, Telkom tidak dapat memastikan bagaimana penegakan FCPA oleh DOJ akan berubah atau berdampak terhadap hasil investigasi DOJ terhadap bisnis Telkom. Selain itu, tidak terdapat kepastian apakah Telkom, afiliasi, karyawan, agen, atau kontraktornya akan memenuhi ketentuan dari pengecualian individual terhadap moratorium penegakan FCPA.

Selanjutnya, penyelidikan oleh SEC atau DOJ tidak seharusnya ditafsirkan sebagai indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, ataupun sebagai cerminan atas tindakan oleh individu, entitas, atau pihak mana pun, serta publikasi seputar proses ini, atau penyelesaian yang timbul dari hasil investigasi ini, meskipun diselesaikan secara menguntungkan untuk Telkom, dapat berdampak negatif terhadap reputasi, bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasional Telkom.

Kami juga terus menjalin kerja sama dan dalam beberapa hal, secara sukarela melaporkan (*self-reported*) berbagai isu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum dan regulasi Indonesia oleh unit usaha dan anak perusahaan Telkom, termasuk antikorupsi, dugaan penipuan, penggelapan, dan masalah yang terkait dengan

piutang, beberapa di antaranya berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ, kepada otoritas pemerintah di Indonesia, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga saat ini, durasi, cakupan, serta dampak dari proses pelaporan dan investigasi terhadap kinerja operasional, bisnis, maupun kondisi keuangan Telkom masih belum dapat dipastikan.

Meskipun hasil akhir dari seluruh proses ini belum dapat dipastikan, manajemen menegaskan komitmennya untuk secara senantiasa konsisten mengikutitahapan proses secara transparan, menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengelola seluruh potensi risiko hukum, keuangan, dan reputasi dengan penuh kehati-hatian.

Rekapitulasi Perkara Gugatan Tahun 2022-2024

Status	Permasalahan Hukum					
	2024		2023		2022	
	Pidana	Perdata*	Pidana	Perdata*	Pidana	Perdata
Dalam proses penyelesaian	62	91	42	55	18	44
Dinyatakan selesai	36	35	13	43	27	27
Sub Total	98	125	55	98	45	71
Total	223		153		116	

Keterangan:

* Merupakan gabungan antara Perkara Perdata dan Non Litigasi.